BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis data pada bab sebelumnya, maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Belanja Modal terbukti memiliki koefisien arah negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Realitas ini menunjukkan bahwa besarnya pengalokasian investasi aset tetap oleh pemerintah daerah belum mampu mendongkrak rasio kemandirian fiskal secara instan pada tahun berjalan. Mayoritas pengeluaran modal tersebut masih terfokus pada penyediaan infrastruktur pelayanan publik dasar yang bersifat nonekonomis dan membutuhkan waktu panjang untuk menghasilkan dampak pengganda. Dengan demikian, hasil pengujian statistik secara resmi memutuskan bahwa hipotesis pertama (H_1) di dalam penelitian ini ditolak.
2. Tingkat Ketergantungan terbukti memiliki pengaruh negatif yang sangat signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi asupan dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat justru akan menurunkan derajat kemandirian keuangan daerah secara kontraktif. Kondisi tersebut mengonfirmasi keberadaan fenomena *flypaper effect* di mana birokrasi lokal cenderung terjebak dalam zona nyaman anggaran dan

kurang terstimulasi untuk mengoptimalkan pemungutan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, hasil pengujian statistik secara resmi menetapkan bahwa hipotesis kedua (H_2) di dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terbukti memiliki koefisien arah negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Ketidaksignifikanan ini terjadi karena tingginya akumulasi SiLPA lebih banyak dipicu oleh praktik *budgetary slack* (kelonggaran anggaran), baik melalui penetapan target pendapatan yang terlalu rendah maupun pengalokasian pagu belanja operasional rutin (Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa) yang terlampau berlebih. Akibatnya, akumulasi dana kas di akhir tahun tersebut hanya menjadi residu administratif sisa operasional semata yang gagal difungsikan sebagai instrumen stimulasi kedaulatan fiskal secara riil. Berlandaskan pada kenyataan empiris tersebut, maka hasil pengujian statistik secara resmi memutuskan bahwa hipotesis ketiga (H_3) di dalam penelitian ini ditolak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan objektif terkait dengan ruang lingkup temporal yang berfokus secara spesifik pada masa transisi pasca-pemberlakuan regulasi tata kelola keuangan daerah yang baru. Pembatasan rentang waktu pengamatan selama dua tahun anggaran dilakukan secara sengaja demi menjaga tingkat relevansi serta aktualitas dari data laporan fiskal terkini. Konsekuensinya, model estimasi data panel yang terbentuk belum mampu menangkap tren fluktuasi

kemandirian daerah dalam perspektif siklus ekonomi jangka panjang. Dinamika penyesuaian tata kelola anggaran pada fase sebelum atau jauh setelah transisi regulasi tersebut secara struktural berada di luar cakupan pengamatan ekonometrika ini.

Keterbatasan berikutnya berkaitan dengan penggunaan jenis variabel yang seluruhnya bersumber pada indikator kuantitatif Laporan Realisasi Anggaran. Pendekatan empiris ini belum mengintegrasikan faktor-faktor eksternal nonkeuangan seperti dinamika kebijakan politik lokal, komitmen kepala daerah, dan indeks reformasi birokrasi. Faktor-faktor kualitatif tersebut secara teoretis juga memiliki andil yang cukup besar dalam memengaruhi orientasi serta efektivitas pengelolaan fiskal di lapangan. Oleh karena itu, interpretasi terhadap tingkat kemandirian fiskal dalam model ini murni terbatas pada dimensi kinerja keuangan yang tercatat secara administratif.

5.3 Saran

Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah disarankan untuk mereorientasi alokasi belanja modal ke arah sektor-sektor produktif yang memiliki nilai pengganda ekonomi (*multiplier effect*) tinggi. Alokasi investasi fisik tersebut dapat difokuskan pada proyek-proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur digital penunjang UMKM, revitalisasi pasar induk regional, serta penyertaan modal komersial pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Upaya ini harus berjalan beriringan dengan perumusan target pendapatan asli daerah yang lebih progresif guna meminimalkan celah kesenjangan anggaran (*budgetary slack*) akibat

penetapan sasaran yang terlampau aman. Melalui penguatan struktur belanja produktif dan peningkatan kapasitas fiskal mandiri tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memutus rantai ketergantungan terhadap dana transfer pusat secara bertahap.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperpanjang rentang horizon temporal pengamatan guna memetakan tren kemandirian fiskal di luar fase transisi pemberlakuan regulasi yang menjadi batasan dalam studi ini. Pengembangan riset ke depan juga sangat direkomendasikan untuk mengintegrasikan variabel kualitatif institusional seperti komitmen kepala daerah, dinamika politik lokal, maupun indeks reformasi birokrasi guna melengkapi analisis yang sebelumnya berfokus pada indikator kuantitatif laporan anggaran. Selain itu, perluasan cakupan yurisdiksi wilayah sampel di luar Provinsi Jawa Tengah dapat diaplikasikan untuk menghasilkan daya generalisasi model yang lebih komprehensif. Kombinasi pemutakhiran indikator waktu dan variasi variabel tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis yang jauh lebih mendalam bagi perkembangan literatur akuntansi sektor publik.

5.4 Implikasi Penelitian

Implikasi dari temuan pengamatan di dalam penelitian ini dijabarkan ke dalam dua dimensi utama, yaitu:

1. Implikasi Teoritis
    a. Kontribusi terhadap *Stewardship Theory*: Temuan ini memperkaya penerapan stewardship theory pada tata kelola pemerintahan daerah.

Ketidaksignifikanan pengaruh Belanja Modal membuktikan bahwa aparatur pemerintah daerah selaku *steward* telah mengalokasikan anggaran publik secara amanah untuk memprioritaskan pelayanan dasar jangka panjang masyarakat. Hal ini mengonfirmasi asumsi bahwa perilaku *steward* tidak dimotivasi oleh kepentingan finansial jangka pendek, melainkan murni berorientasi pada kesejahteraan publik selaku principal.

b. Validasi Empiris Fenomena *Flypaper Effect*: Pengaruh negatif signifikan dari variabel Tingkat Ketergantungan memberikan konfirmasi teoretis yang kuat mengenai dampak buruk dana transfer pusat. Fenomena ini membuktikan bahwa pasokan dana eksternal yang melimpah justru memicu zona nyaman fiskal bagi birokrasi lokal, sehingga berkurangnya daya inovasi dalam menggali dan memperluas basis pendapatan asli daerah.

2. Implikasi Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah: Jajaran pemerintah kabupaten dan kota dituntut untuk mereformasi struktur APBD dengan menggeser belanja infrastruktur administratif ke arah proyek produktif yang memiliki efek pengganda ekonomi tinggi, seperti sektor UMKM dan BUMD. Selain itu, birokrasi wajib menghentikan strategi penentuan target pendapatan yang rendah agar sisa kas daerah tidak menganggur dan dapat berputar di tengah ekonomi masyarakat.

b. Bagi Pemerintah Pusat: Kementerian Keuangan dan Kemendagri perlu mengevaluasi formula desentralisasi fiskal dalam regulasi UU HKPD. Mengingat dana transfer terbukti memperparah ketergantungan daerah, skema penyaluran dana penyeimbang ke depan harus didesain ulang agar lebih berbasis insentif guna merangsang daerah berkompetisi meningkatkan kemandirian fiskalnya secara berdaulat.